

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afan Gafar, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amancik, 2013, *Model Pemilihan Kepala daerah Berdasarkan UUD 1945 Dalam Rangka Otonomi Daerah*.(Disertasi, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum).Malang.
- Ar. Rusydi, 1987, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.
- Burhannudin Tayibnapi, 1986, *Admininstrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta*
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Faisal Abdullah, 2011 *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Rangkang Education.Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie,2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Maurice Duverger.1954, *Political Parties*(Methuen and Co).London.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Michael Rush dan Phillip Althoff (terjemahan Kartini Kartono), 2002, *Pengantar Sosiologi Politik (An Introduction to Political Sociology)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2013, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.(Pustaka Studi Hukum Tata Negara) , FHUI, Jakarta
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasui Negara*, Rajawali Bandung.
- Rod Hague et al., 1998, *Comparative Government and Politics*(MacMillan Press).London.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Said Gatara & Moh Dzulkiah Said, 2007, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, CV Pustaka Setia Bandung, Cetakan I, hal. 191.
- S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sarundajang, 2003, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satoto Sukamto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, HK Offset, Yogyakarta
- Soenarjati Hartono, *Asas-asas Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Hukum Nasional, No. 2 Tahun 1988, BPHN, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Hartini,dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharizal, 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tedi Sudrajat, 2008, "Materi Kuliah Hukum Kepegawaian" Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, Unsoed Press. Purwokerto.
- Teuku may Rudy, 1993, *Pengantar Ilmu politik*, Eresco Bandung.
- Vernon Bogdanor.ed., 1991, *The Blackwell Encyclopedia of Polical Science*(Blackwell publishers).Oxford.
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyeleenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- WJS, Poerwadarminta, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Z. R. P. TJ. Mulyono, SH., 2008, *Kebijakan Netralitas Politik PNS dalam Perspektif Perlingdungan HAM* , Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan lampiran Peta daerah Pemilihan dan Kursi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/08.A/M.PAN/V/200 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Serentak.

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

Zamzami, 2009, *Kontroversi Netralitas PNS dalam Pilkada*.Jurnal Ilmu Hukum No.I Vol. FH UMA

Ismail Sunv, 1970, *Sitem Pemilihan Umum Yang Menjamin Hak-Hak Demokrasi Warga Negara*.dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Sunv mengenai pemilihan umum,dihimpun oleh Harmaily Ibrahim.

D. Internet

www.beritaplatmerah.com, tanggal 2 agustus 2015.

[www. Cahayareformasi.com](http://www.Cahayareformasi.com) tanggal 1 Agustus 2015.

www.kompasiana.com tanggal 1 Oktober 2014.diunduh 15 Januari 2016.

www.liputan6.com, tanggal 3 Oktober 2015.

[www. menpan.go.id](http://www.menpan.go.id), tanggal 2 Oktober 2015

Djunaedi Sadjiman., *Politisasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*.<http://www.pdfcost.org> diakses 3 Maret 2016. Jam. 16.00

www.panwascambelik.blogspot.com tanggal 2 Nopember 2015.

<https://suripto3x.files.wordpress.com/2010/12/tulisan-netralitas-biroktasi>,
diunduh tanggal 5 Pebruari 2016.

www.spberitasatu.com, tanggal 10 Desember 2015, diunduh 16 Januari 2016.